

## **Analisis Kerentanan dan Pemetaan Stakeholders di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka (Kajian Pemetaan Sosial di Wilayah Operasional PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara)**

**Abdul Sabaruddin<sup>1</sup>, Nursamsir<sup>2</sup>, Taslim Fait<sup>3</sup>, Maulid<sup>4</sup>, Sudirman Baso<sup>5</sup>**  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
<sup>1</sup>abdulsabaruddin@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of this study is to identify vulnerable community groups and map the interests of stakeholders in the area of operation of PT Antan Tbk UBPN Sultra. This study was conducted in Pomalaa District, through a mixed method approach that combines quantitative data analysis methods. Because this study uses a mixed method approach, the informant is used as a source of data in a qualitative approach. The determination of informants is done by snowball sampling method. Meanwhile, the probability sampling technique is used for the quantitative approach. Proportional cluster sampling is a form of probability sampling that is used, and the way it works is by identifying in advance the groups that represent the population. Information collected through the results of field research, both primary data and secondary data. The results show that the vulnerable groups in the company's operational areas were pre-prosperous families (poor families), the elderly, people with disabilities, and the mentally handicapped (physical, speech and hearing impaired, mental, and blind). Pre-prosperous families (poor families) are the highest vulnerable group, reaching 2,152 people out of 30,680 residents of Pomalaa Subdistrict. Meanwhile, stakeholders that influence the success of company programs in Pomalaa Subdistrict are the village head, village secretary, head of Bumdes, traditional leaders, women leaders, religious leaders (Islamic and Christian), and community leaders.*

**Keywords: Social Mapping; Stakeholders; Vulnerability**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan dan memetakan kepentingan pemangku kepentingan di wilayah operasi PT Antan Tbk UBPN Sultra. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pomalaa, melalui pendekatan *mixed methode* yang menggabungkan metode analisis data kuantitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methode*, maka informan digunakan sebagai sumber data dalam pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Sementara itu, teknik *probability sampling* digunakan untuk pendekatan kuantitatif. *Proportional cluster sampling* adalah bentuk *sampling probabilitas* yang digunakan, dan cara kerjanya adalah dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok-kelompok yang mewakili populasi. Informasi dikumpulkan melalui hasil penelitian lapangan, baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kelompok rentan di wilayah operasional perusahaan adalah, keluarga pra sejahtera (keluarga miskin), lanjut usia, penyandang disabilitas, cacat jiwa (fisik, tuna rungu dan tuna wicara, mental, dan tuna netra). Keluarga pra sejahtera (keluarga miskin) merupakan kelompok rentan tertinggi mencapai 2.152 jiwa dari 30.680 jiwa penduduk Kecamatan

Pomalaa. Sementara stakeholder yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program perusahaan di Kecamatan Pomalaa adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala Bumdes, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama (Islam dan Kristen), dan tokoh masyarakat.

### **Kata Kunci: Pemetaan Social; Stakeholder; Kerentanan**

#### **Pendahuluan**

Setiap masyarakat memiliki kondisi sosial yang unik yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan dan kebutuhan, maka pemetaan sosial menjadi kegiatan yang krusial untuk dilakukan agar dapat memahami kondisi sosial masyarakat setempat. Pemetaan sosial digunakan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan keberadaan dan aktivitas para aktor dalam program, mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan menganalisis potensi konflik yang ada di masyarakat, di samping untuk mengetahui kebutuhan dasar, potensi sumber daya, dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat (Handoyo & Sudrajat, 2016). Selanjutnya menurut Gunawan (2018), pemetaan sosial adalah proses yang digunakan untuk memahami keadaan sosial di daerah sekitar. Kegiatan ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan karena setiap wilayah memiliki dinamika sosial tersendiri yang menghasilkan masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda. (Gunawan & Sutrisno, 2021).

Tahap pertama dalam menyusun rencana dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang efektif dan terfokus adalah pemetaan sosial, yang juga berfungsi sebagai basis data. Pemetaan sosial bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum mengenai kebutuhan pemangku kepentingan, kebutuhan masyarakat, dan kelompok rentan. Salah satu kelompok yang membutuhkan pertimbangan substansial dalam hal kebijakan dan layanan adalah kelompok rentan. Dari aspek kebijakan, perhatian lebih terhadap kelompok rentan dinyatakan secara tegas dalam UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kelompok rentan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (DPR & Presiden Republik Indonesia, 1999). Sedangkan menurut *Human Rights Reference 3* disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugees*; b. *Internally Displaced Persons* (IDPs); c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women* (Mohammad Teja et al., 2015).

Menurut Islam & Hossain (2014), kelompok rentan adalah mereka yang dapat terpengaruh secara langsung dan cepat akibat masalah-masalah sosial seperti bencana alam atau krisis ekonomi (Kiling-Bunga & Kiling, 2019). Karenanya, agar kebutuhan mereka terpenuhi, dukungan untuk kelompok ini sangat penting. Memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai dalam pelayanan sosial dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sentuhan program terhadap kelompok rentan menjadi hal yang prioritas dilakukan baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Berbagai program diluncurkan pemerintah maupun organisasi swasta (perusahaan) untuk mendukung kebutuhan kelompok rentan. Pada organisasi perusahaan, pemenuhan kegiatan sosial menjadi hal yang wajib dilakukan. Menurut Ghani (2016) keberhasilan perusahaan tidak hanya tergantung pada seberapa sukses usahanya memberikan keuntungan finansial, tetapi ditentukan juga seberapa baik perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan kegiatan perusahaan yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk

mendorong perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini disebut *corporate social responsibility* (CSR).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (Jumadiyah, Manfarisyah, 2018). Selanjutnya Milton Friedman, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan perusahaan yang dijalankan sesuai dengan tujuan pemilik perusahaan, umumnya berupa keuntungan yang maksimal, dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta mematuhi nilai-nilai dasar dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan (Jumadiyah, Manfarisyah, 2018).

Salah satu kesulitan yang sering dihadapi perusahaan adalah memastikan bahwa program CSR perusahaan benar-benar bermanfaat bagi para penerimanya dan bukan sekedar pencitraan. Karena itu, perlu dilakukan *social mapping* (pemetaan sosial) sebagai dasar dalam penyusunan rencana program CSR baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun berdasarkan temuan awal yang diperoleh penulis di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah operasional PT Antam UBPN Sultra, dimana aktivitas-aktivitas perusahaan nikel dinilai kurang berhasil menjangkau kelompok rentan. Beberapa program perusahaan melalui *corporate social responsibility* (CSR) maupun pemerintah yang bersentuhan dengan kelompok rentan tidak memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan karena program tersebut kurang menyentuh apa yang menjadi kebutuhan kelompok sasaran. Faktor lainnya adalah ketidakmampuan dalam menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan peran stakeholder dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan peta jaringan sosial yang memberi gambaran tentang stakeholder yang berpengaruh dan mengklasifikasikan berdasarkan kepentingan dalam program-program pembangunan termasuk peta identifikasi kelompok rentan dan penyebabnya. Penelitian tentang kelompok rentan dan analisis pemangku kepentingan dalam pembangunan sudah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan Kiling-Bunga & Kiling (2019) dengan judul menjangkau kelompok rentan di desa terpencil. Penelitian ini membahas mengenai keadaan kelompok rentan di Desa Ongulero Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Ditemukan bahwa kelompok keluarga rentan ini tergabung dalam satu kolom yang sama di dalam gereja Bala Keselamatan Desa Ongulero yaitu kolom Saron-Sarawo (SS). Kelompok SS sendiri merupakan kelompok yang terbentuk dalam kaitannya dengan gereja karena desa Ongulero tidak mengelompokkan mereka secara formal.

Penelitian lain dilakukan Tamami (2015) dengan judul Pemetaan Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kawasan Agropolitan Suburbang Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi peran yang dilakukan masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan Agropolitan Suburbang di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pembangunan Umum Kabupaten, LSM, perguruan tinggi, masyarakat, Bappeda, kelompok tani, dan dunia usaha merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kawasan agropolitan Suburbang di Kabupaten Bangkalan. Organisasi-organisasi ini akan mendukung pengembangan kawasan agropolitan Suburbang dalam bidang ekonomi.

Kemudian penelitian Widodo et al. (2018) dengan analisis *stakeholders* dalam pengembangan ekowisata di taman nasional Betung Berihun Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi *stakeholders*, untuk mengklasifikasikan

*stakeholders* dan untuk menggambarkan hubungan antar *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK. Temuan penelitiannya terdapat 23 *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK, yang berkedudukan sebagai *subject*, *key players*, *context setter* dan *crowd* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Hubungan yang terjadi di antara *stakeholders* berupa komunikasi, koordinasi dan kerjasama, baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan. *Stakeholders* yang masuk dalam klasifikasi *key players* dan memiliki jalinan hubungan antar *stakeholders* yang banyak, memiliki peranan besar dalam pengembangan ekowisata di TNBK.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji salah satu persoalan saja yakni analisis kelompok rentan atau menganalisis stakeholder. Sementara penelitian ini penulis menganalisis secara bersamaan kelompok rentan dan pemetaan stakeholder. Kemudian studi kelompok rentan yang dilakukan peneliti terdahulu hanya mengkaji kelompok rentan pada satu desa saja dan terfokus pada kelompok rentan anak. Penelitian ini, penulis mengkaji keberadaan kelompok rentan di wilayah kecamatan termasuk mengidentifikasi penyebab mereka sebagai kategori kelompok rentan. Terkait kajian stakeholder, penelitian terdahulu hanya menggambarkan atau klasifikasi *stakeholder* berdasarkan derajat pengaruh sementara dalam penelitian, penulis selain menggambarkan derajat pengaruh stakeholder juga memberikan informasi langkah-langkah yang dilakukan perusahaan atau pemerintah dalam membangun hubungan dengan stakeholder sebagai dasar intervensi perusahaan dan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kecamatan Pomalaa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan "*mixed method*". Karena penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan, maka informan dijadikan sebagai sumber data untuk pendekatan kualitatif. Pendekatan *snowball sampling* digunakan sebagai cara untuk memastikan jumlah informan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik *probability sampling*. *Proportional cluster sampling* adalah bentuk *probability sampling* yang digunakan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok-kelompok yang mewakili populasi. Tiga kelompok yang dimaksud adalah: (1) masyarakat umum; (2) tokoh masyarakat; dan (3) perwakilan pemerintah setempat. Untuk memilih "aktor" sebagai responden dari kelompok-kelompok tersebut, digunakan metode *purposive sampling*. Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi primer dikumpulkan dari desa-desa di Kecamatan Pomalaa melalui diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui makalah penelitian, jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya. Proses reduksi data dilakukan dengan melakukan penyederhanaan data, menemukan tema-tema penting yang tersebar, dan membuat kerangka kerja untuk penyajian data. Aktivitas mempersiapkan kesimpulan informasi ke dalam pernyataan yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dikenal sebagai penyajian data (*data display*). Pada awalnya data yang tersebar dan terpisah-pisah dalam berbagai sumber informasi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, selanjutnya dikategorikan berdasarkan tema-tema dan kebutuhan untuk dianalisis. Penarikan dan verifikasi kesimpulan adalah langkah terakhir. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kelompok Rentan

Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian lebih besar untuk meningkatkan kondisi kehidupannya adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah

mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga menimbulkan masalah karena ketidakmampuannya. Pada dasarnya, ketiadaan sumber daya ekonomi yang dimiliki, akses (geografis), dan faktor ekonomi yang dikuasai oleh kelompok tertentu menjadi penyebab timbulnya kelompok rentan. Berdasarkan data yang diperoleh, masalah kesejahteraan sosial yang cukup menonjol di Kecamatan Pomalaa, adalah kemiskinan. Tercatat jumlah penduduk penduduk pra sejahtera di Kec. Pomalaa mencapai 2.152 jiwa.

Tabel 1. Sebaran Kelompok Rentan di Kecamatan Pomalaa Menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pomalaa

DESA/ KELURAHAN	KELUARGA PRA	ANAK PUTUS SEKOLAH					LANSIA	CACAT JIWA			
		SD	SMP	SMA	PT	JML		FISIK	TUNARUN	MENTAL	TUNA
OKO-OKO	158	129	4	26	77	236	14	1	0	2	0
SOPURA	281	0	36	19	128	183	12	0	3	3	0
HAKATUTOBU	130	0	64	65	107	236	8	2	0	1	1
TAMBEA	202	37	19	5	107	168	11	0	1	0	0
KUMORO	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
POMALAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAWI-DAWI	385	0	4	20	32	56	554	6	5	1	1
TONGGONI	215	0	0	0	0	0	29	0	0	1	1
TOTOBO	30	6	0	0	17	117	19	0	1	0	0
PELAMBUA	276	3	8	9	97	76	28	2	4	5	1
PESOUHA	80	-	3	-	95	98	25	1	1	1	2
HUKO-HUKO	395	10	7	78	217	305	39	4	2	5	5
<b>JUMLAH</b>	<b>2.152</b>	<b>185</b>	<b>145</b>	<b>222</b>	<b>877</b>	<b>1.476</b>	<b>747</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

Berdasarkan tabel di atas, keluarga miskin atau keluarga prasejahtera adalah keluarga yang paling rentan. Jumlah keluarga pra sejahtera di Kecamatan Pomalaa mencapai 2.152 jiwa. Keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pembinaan agama. Di Kecamatan Pomalaa jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi di Desa Huko-Huko sekitar 395 jiwa. Kemudian Kelurahan Dawi-Dawi mencapai 385 jiwa, Desa Pelambua sekitar 276 jiwa, Desa Sopura sekitar 281 jiwa, serta Kelurahan Tonggoni dan Desa Tambea masing-masing sekitar 215 jiwa dan 202 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara, keluarga pra sejahtera di Kecamatan Pomalaa termasuk dalam kategori rentan karena mayoritas dari mereka bekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Rendahnya pendapatan mereka menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyebab utama jumlah keluarga miskin dan pra sejahtera. Jumlah pengangguran di Kecamatan Pomalaa mencapai 2.544 orang. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja dalam jumlah besar yang tidak terserap ke dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga tidak memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan. Faktor lain tingginya angka pengangguran di Kecamatan Pomalaa karena sempitnya lapangan pekerjaan sementara jumlah penduduk usia kerja setiap tahunnya bertambah. Kondisi ini sesuai yang disampaikan Saragi et al. (2021) keterbatasan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka biasanya disebabkan oleh kurangnya peluang usaha dan pekerjaan, kurangnya keterampilan dan keahlian, dan kurangnya perlindungan kerja yang memadai.

Anak putus sekolah merupakan kelompok rentan lainnya. Jumlah anak yang tidak bersekolah di Kecamatan Pomalaa hampir ditemukan pada semua desa dan kelurahan khususnya jumlah penduduk usia sekolah baik pada tingkat perguruan tinggi yang jumlahnya cukup besar sekitar 877 jiwa. Sementara jumlah keseluruhan anak putus sekolah mulai jenjang SD sampai jenjang perguruan tingginya sekitar 1.476 jiwa. Jumlah tertinggi di Desa Huko-Huko mencapai 305 jiwa, Desa Oko-Oko dan Desa Hakatutobu sekitar 236 jiwa, Desa Sopura 183 jiwa, Desa Tambea 168 jiwa, Desa Totobo 117 jiwa. Kemudian tertinggi kedua anak putus sekolah pada usia tingkat pendidikan SMA/ sederajat sekitar 222 jiwa, tingkat SD/ sederajat sekitar 185 jiwa dan tingkat SMP/ sederajat sekitar 145 jiwa. Dari data diatas terpetakan, Desa Oko-Oko merupakan wilayah yang memiliki jumlah tertinggi penduduk anak putus sekolah pada usia SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat yang mencapai sekitar 129 jiwa. Sedangkan untuk tingkat SMP/ sederajat jumlah tertinggi anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan adalah Desa Hakatutobu sekitar 64 jiwa dan tingkat SMA/ sederajat jumlah tertinggi di Desa Huko-Huko dan Hakatutobu masing-masing 78 jiwa dan 65 jiwa.

Hasil wawancara dan FGD terungkap bahwa penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Pomalaa adalah

- a. Kondisi ekonomi keluarga. Pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Tidak sedikit anak yang berhenti sekolah atau menghentikan pendidikannya karena keterbatasan biaya, ditambah lagi dengan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kondisi ini terjadi di Desa Oko-Oko dan Desa Hakatutobu.
- b. Aksesibilitas: Aksesibilitas yang dimaksudkan disini adalah jarak tempuh sekolah dan sarana transportasi yang kurang tersedia. Seperti dialami masyarakat di Desa Hakatutobu dan Oko-Oko, yang anak usia sekolah khususnya tingkat SMA memilih tidak lanjut karena jarak tempuh dan minimnya transportasi yang digunakan untuk sekolah. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian Perdana (2015) bahwa kemungkinan anak untuk bersekolah dipengaruhi oleh faktor wilayah, lingkungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi setempat. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan menghasilkan kesenjangan. (Anwar, 2022).
- c. Rendahnya kesadaran anak untuk bersekolah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup. Kondisi ini terjadi di Desa Oko-Oko, Sopura, Hakatutobu, Tambea, dan Huko-Huko. Kondisi ini seperti yang disampaikan Amriani & Ahmad (2018) bahwa ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan bagi diri sendiri dan orang banyak disebabkan oleh kurangnya motivasi atau pengetahuan individu akan nilai pendidikan. Kondisi ini berdampak pada banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Kurangnya pemahaman tentang nilai pendidikan mengakibatkan kurangnya motivasi seseorang.
- d. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Pomalaa adalah kurangnya kesadaran orang tua untuk mendidik, membina dan mengarahkan anak mereka untuk menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Kondisi ini terjadi di Desa Oko-Oko, Sopura, Hakatutobu, dan Huko-Huko. Faktor-faktor tersebut sesuai yang disampaikan Slameto (2003) menegaskan bahwa orang tua yang sama sekali tidak peduli dengan pendidikan anaknya dan orang tua yang kurang memberikan perhatian atau inspirasi bagi pendidikan anak misalnya tidak mengatur waktu belajar anak, tidak menyediakan atau melengkapi bahan belajar anak, dan tidak menyikapi kesulitan yang dihadapi dalam belajar. Hal ini dialami anak yang berasal dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kewajiban lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa seorang anak membutuhkan dorongan dari orang tua untuk mengejar pendidikannya (Amriani & Ahmad, 2018).

Kelompok rentan berikutnya adalah kelompok lanjut usia (Lansia). Lansia dipandang sebagai penduduk yang rentan karena keterbatasan fisik yang disebabkan oleh usia lanjut, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Lansia lebih rentan terhadap penyakit karena usia mereka yang sudah tua, dan kondisi ini dapat mengganggu aktivitas rutin mereka. Di Kecamatan Pomalaa, sebagian besar Lansia tinggal bersama anggota keluarganya akan tetapi tidak jarang juga menemukan lansia yang tinggal sebatangkara tanpa ditemani oleh siapapun. Jumlah lansia di Kecamatan Pomalaa sekitar 747 jiwa. Jumlah terbanyak di Kelurahan Dawi-Dawi sekitar 554 jiwa. Berikutnya di Desa Huko-Huko sekitar 39 jiwa, Kelurahan Tonggoni, 29 jiwa, Desa Pelambua 28 jiwa dan Desa Pesouha 25 jiwa. Kebutuhan bagi Lansia di Kecamatan Pomalaa adalah jaminan sosial dan kesehatan. Terakhir, kelompok rentan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Kecamatan Pomalaa sangat rendah hanya sekitar 47 jiwa. Penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Pomalaa biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor kelahiran, terkena penyakit, dan tekanan pikiran. Kebutuhan kelompok rentan disabilitas adalah dengan diberikannya jaminan kesehatan serta sarana dan prasarana yang layak. Kelompok rentan penyandang disabilitas menurut Effendi et al. (2020) diakibatkan keterbatasan aset. Ada dua jenis keterbatasan aset: fisik dan non-fisik. Keterbatasan non-fisik meliputi kurangnya kepemilikan tanah, properti, atau tempat tinggal, seperti yang terjadi pada masyarakat miskin, sedangkan keterbatasan fisik adalah tidak berfungsinya anggota tubuh, apakah akibat kecelakaan atau kondisi bawaan.

## 2. Pemetaan Stakeholders

Townsley (1998) membedakan antara *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder untuk menggambarkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan atau kegiatan. *Stakeholder* primer adalah mereka yang secara langsung mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya, baik melalui eksploitasi atau sebagai sumber pendapatan (Wakka, 2014). Sementara menurut Reed (2008) *stakeholder* adalah mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hetifah (2003) menjelaskan *stakeholder* adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, ataupun memiliki dampak positif atau negatif terhadap program atau kegiatan pembangunan (Amalan et al., 2021). *Stakeholder* di wilayah operasional PT Antam Tbk UBPN Sultra dapat dikelompokkan dalam pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka matriks pemetaan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Identifikasi Sebaran Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders di Setiap Desa dan Kelurahan Pada Kecamatan Pomalaa

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diklasifikasikan *stakeholder* yang terlibat dalam wilayah operasi PT Antam Tbk UBPN Sultra di Kecamatan Pomalaa yakni :

- a. *Key player* (pemain kunci) adalah *stakeholder* yang dianggap penting bagi program kerja perusahaan karena pengaruh dan tingkat kepentingannya besar. *Stakeholder* tersebut adalah kepala desa, ketua BPD, tokoh agama Islam, sekretaris desa dan ketua LPM.
- b. *Context Setter* (pendukung) adalah *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang rendah namun memiliki pengaruh yang besar. Pemuka agama Kristen dan ketua kelompok pemuda termasuk dalam kategori pendukung terhadap program perusahaan. *Stakeholder* ini harus selalu diperhitungkan karena mereka dapat mempengaruhi *stakeholder* lainnya, terutama dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat desa yang bertugas mengawasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa.
- c. *Subject* (Subyek) yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang kuat namun memiliki pengaruh yang rendah dianggap sebagai subjek. *Stakeholder* ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat. Para *stakeholder* ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengubah situasi program, tetapi jika mereka dapat berkolaborasi dengan *stakeholder* lain, mereka mungkin dapat mempengaruhi *stakeholder* lainnya.
- d. *Crowd* (Pendukung Lainnya) adalah *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap perusahaan. Meski demikian, mereka masih dipandang sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Ketua BUMDes dan toko perempuan adalah termasuk di dalam *stakeholder* ini.

Pengelompokan *stakeholder* berdasarkan matriks di atas sesuai pandangan Bryisson (2004), analisis peran *stakeholder* dimulai dengan menyusun *stakeholder* dalam matriks dua kali dua berdasarkan tingkat kepentingan mereka dalam masalah dan kemampuan mereka untuk memberikan dampak pada masalah tersebut. (Putri, 2010). Sementara Mitchell et al. (1997) mengategorikan peran *stakeholder* ke dalam tiga kategori. Ketiga kategori tersebut adalah a) kekuasaan (*power*). Kekuasaan mengacu pada kapasitas pemangku kepentingan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti tindakan tertentu, b) legitimasi: perilaku pemangku kepentingan di bidang hukum dan etika social, dan c) urgensi: pemangku kepentingan ditentukan oleh seberapa penting mereka bagi pemangku kepentingan lainnya (Berliandaldo, 2021).

Dari pengelompokan di atas, diketahui bahwa berdasarkan kepentingan dan pengaruh maka *stakeholder* yang terlibat dalam program PT Antam Tbk UPBN Sultra yaitu *key players*, *context setter*, dan *crowd*. *Stakeholder* yang masuk dalam kategori *key players* berdasarkan matriks tersebut dominan pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, LPM, BPD, dan unsur tokoh masyarakat berasal dari tokoh agama. Kondisi ini menggambarkan bahwa aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi *stakeholder* yang menentukan keberhasilan program perusahaan dan mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan program. Selain itu, kelompok ini memiliki legitimasi yang kuat dan berperan sentral dalam melahirkan dan mengembangkan isu-isu program perusahaan termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap perencanaan program, tokoh masyarakat (tokoh agama) merupakan unsur berpengaruh yang menentukan program-program yang akan dilakukan dan membangun pemahaman masyarakat terhadap program perusahaan yang akan dilaksanakan. Kuatnya pengaruh kelompok ini disebabkan adanya dukungan dari masyarakat yang memberikan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap program, *stakeholder key player* memiliki tanggungjawab dalam membangun kelembagaan lokal dan memainkan peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai pandangan Hidayatulloh & Turhan (2022) bahwa tokoh masyarakat memiliki peran

penting dalam pembangunan desa karena memiliki misi dan visi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan, Budiarto (1972) menjelaskan tokoh masyarakat adalah mereka yang memegang peranan penting dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki pengaruh, khususnya kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain sesuai dengan kehendaknya (Porawouw, 2016).

Kelompok berikutnya *context setter*. Termasuk dalam *stakeholder* ini adalah ketua karang taruna dan tokoh agama Kristen. Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh keterangan bahwa *stakeholder* ini tidak memiliki pengaruh langsung dengan program-program perusahaan tetapi memiliki kepedulian dan perhatian yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang dilakukan perusahaan. Karena itu, *stakeholder* ini memiliki peran yang strategis dalam mendorong keberlanjutan dan pengembangan program. Kapasitas *stakeholder* ini sebagai ketua karang taruna dan tokoh agama ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam menentukan program-program lanjutan yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam meencanakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kemudian *stakeholder subject* (Subyek). Tokoh adat dan tokoh masyarakat merupakan *stakeholder* yang masuk kategori subyek. Hasil wawancara dengan narasumber terungkap, *stakeholder* ini memiliki kekuatan yang rendah dalam menentukan program perusahaan di Kecamatan Pomalaa yang merupakan wilayah operasional perusahaan. Tetapi, *stakeholder* ini memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dan jejaring dengan *stakeholder* lain karena kedudukannya sebagai *stakeholder* yang ditokohkan.

Terakhir *crowd* (pendukung). Termasuk *stakeholder* ini adalah ketua BUMDes dan tokoh perempuan. *Stakeholder* dalam kategori ini meski memiliki pengaruh dan kekuatan yang rendah, namun perannya dalam mendukung keberhasilan program perusahaan di wilayah operasional perusahaan cukup baik. Dari *stakeholder* ini, perusahaan mendapatkan informasi tentang keberhasilan dan penyebab gagalnya program perusahaan di wilayah Kecamatan Pomalaa. Sehingga keberadaan mereka cukup mendapat tempat yang baik dari perusahaan karena *stakeholder* ini banyak memiliki informasi sebagai bahan kajian dan evaluasi program sebagai dasar perusahaan dalam mendesain kembali program yang akan dilakukan.

Dari hasil analisis dan temuan lapangan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun hubungan dengan *stakeholder* tersebut adalah :

- a. *Key Player* (pemain kunci). *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap perusahaan, perusahaan harus memiliki hubungan yang kuat dengan para *stakeholder* ini melalui komunikasi yang baik. *Stakeholder* ini harus diberi peran lebih dan aktif dalam program, termasuk dalam mengevaluasi program dan sebagai mitra dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- b. *Context setter* (pendukung). *Stakeholder* yang tidak terlalu penting namun memiliki pengaruh yang besar. Perusahaan harus membangun hubungan positif dengan kelompok ini dan secara terus-menerus menginformasikan kepada mereka tentang program-program yang dijalankan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Keberadaan *stakeholder* ini perlu dipantau dan dikontrol dengan baik karena dapat menimbulkan risiko. Akibat sebuah peristiwa, *stakeholder* ini bisa saja berkembang menjadi partisipan yang penting (*key player*). Perusahaan harus terus menjalin hubungan baik dengan para aktor ini. Oleh karena itu, tetap perlu untuk memberikan semua informasi yang mereka butuhkan agar mereka dapat terus berpartisipasi aktif dalam pencapaian program.

- c. *Subjects* (subyek). *Stakeholder* yang memiliki peran penting namun kurang berpengaruh. Aktor-aktor ini memiliki kemampuan yang terbatas untuk mewujudkan tujuan program, namun mereka dapat memperoleh kekuatan dengan bergabung bersama aktor-aktor lainnya. Hubungan dengan aktor-aktor ini harus dijaga karena mereka biasanya sangat membantu dalam mendukung program.
- d. *Crowd* (pendukung lain). Kelompok *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan wewenang yang terbatas. Dikarenakan pengaruh dan kepentingan para *stakeholder* ini biasanya mengalami dinamika seiring waktu, maka perusahaan harus terus memantau dan menjaga komunikasi dengan baik.

### **Kesimpulan**

Masyarakat di Kecamatan Pomalaa berada dalam kondisi rentan karena kurangnya sumber daya ekonomi yang dimiliki dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan atau pra sejahtera merupakan kategori yang paling rentan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Akibat mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan hanya bekerja paruh waktu, maka pendapatan mereka sangat rendah. Kondisi ini berdampak munculnya kelompok rentan lain seperti anak putus sekolah. Karena itu, dibutuhkan kerjasama dan sinkronisasi program antara pemerintah daerah (kecamatan dan desa) dengan perusahaan serta melibatkan *stakeholder* dalam menentukan program-program perusahaan yang bersentuhan dengan masyarakat. Keterlibatan *stakeholder* ini penting dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi terkait kebutuhan, tingkat dukungan dan pengaruh dalam pelaksanaan program-program perusahaan. Dari pengelompokan kelompok kepentingan, berdasarkan kepentingan dan pengaruh maka *stakeholder* yang terlibat dalam program PT Antam Tbk UPBN Sultra yaitu *key players*, *context setter*, dan *crowd*. *Stakeholder* yang masuk dalam kategori *key players* yaitu kepala desa, sekretaris desa, LPM, BPD, dan unsur tokoh masyarakat berasal dari tokoh agama. Kondisi ini menggambarkan bahwa aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi *stakeholder* yang menentukan keberhasilan program perusahaan dan mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan program. Selain itu, kelompok ini memiliki legitimasi yang kuat dan berperan sentral dalam melahirkan dan mengembangkan isu-isu program perusahaan termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Amalan, A., Utha, A., & Yusuf, M. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 41.
- Amriani, P. K., & Ahmad, M. R. S. (2018). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan di Lingkungan II Patommo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 5, 119–125.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15.
- Berliandaldo, M. (2021). *Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong*. 04, 221–234.
- DPR & Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.

- Effendi, L., Darwis, R. S., & Apsari, N. C. (2020). Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share : Social Work Journal*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Ghani. (2016). *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Cetakan Pe). PT Penerbit IPB Press.
- Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2021). Pemetaan sosial untuk perencanaan pembangunan masyarakat. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 2(2), 94–105.
- Handoyo & Sudrajat. (2016). Pemetaan Sosial Untuk Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemantren, Lamongan. In Wahyudi (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Mengawal Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals)* (p. 699). Unesa University Press.
- Hidayatulloh, M. F., & Turhan, M. Y. (2022). Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10, 540–554.
- Jumadiyah, Manfarisyah, S. & H. (2018). *Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility di Provinsi Aceh*. Unimal Press.
- Kiling-Bunga, B. N., & Kiling, I. Y. (2019). Menjangkau Kelompok Rentan di Desa Terpencil. *Journal of Health and Behavioral Science*, 1(3), 179–190.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication, Inc.
- Mohammad Teja, Yesserie, Nastiti, N. N., Firawati, T., & Prabandari, E. H. A. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Kelompok Rentan Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Lombok. *Nhk 技研*, 151(1), 43–70.
- Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). *Jurnal Politico*, 5(1), 1–17.
- Putri, D. F. (2010). *Analisa stakeholder dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota madiun*. 1–10.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10.
- Tamami, N. D. (2015). Pemetaan Peran Stakeholder Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kawasan Agropolitan Suburbang Kabupaten Bangkalan. *Pamator*, 8(2), 133–146.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47.
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 55–61.